**ABSTRAK**

Dalam mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Bupati Purworejo mengeluarkan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Dengan maksud agar pelayanan publik di Kabupaten Purworejo berkualitas dan berjalan dengan efektis serta efisien. Pengamatan ini memfokuskan dalam pembahasan pada ***Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo***. Dalam pengamatan ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kutoarjo serta faktor penghambat dan upaya dalam mengatasi penghambat implentasi Kebijakan PATEN.

 Penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskrptif. Metode ini menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus yang diamati dan dikaji serta di sesuaikan dengan teori implementasi Kebijakan dari Edward III yang mempunyai 4 faktor yaitu Komunikasi, sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan narasumber yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Purworejo telah berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan PATEN, yaitu kurang pahamnya masyarakat terkait persyaratan permohonan, kurangnya partisipasi aktif dalam sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PATEN.

 Melihat hal tersebut maka penulis menyarankan agar pemerintah kabupaten dapat mengambil tindakan untuk melakukan peninjauan kembali terkait penghambat dalam implementasi program PATEN. Perlunya dukungan dana untuk kecamatan, peningkatan sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya serta peningkatan inovasi yang di lakukan Camat dalam program PATEN tersebut.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Terpadu**

 **Kecamatan (PATEN), Kecamatan**

**ABSTRACT**

*In order to facilitate and expedite the implementation of public services accordance with Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 about Administration Service for Integrated Districts (PATEN), Regent of Purworejo issues Regent Regulation Number 5 Year 2014 about Standard of Administration Service for Integrated Districts (PATEN). With the intention that the public service in Purworejo Regency is qualified and runned effectively and efficiently. This observation focuses on* ***the Implementation of Regulation Policy Number 5 Year 2014 about Standard of Administration Service for Integrated Districts (PATEN) in Kutoarjo District, Purworejo Regency****. In this observation, the authors have purpose to know the description about implementation Standard of Administration Service for Integrated Districts (PATEN) in Kutoarjo Sub-district as well as inhibiting factors and efforts in overcoming the impedence of implication of PATENT Policy.*

*The author uses descriptive qualitative methods. This method describes the aspects related to the focus observed and studied and adapted to the theory of policy implementation of Edward III which has four factors namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Based on observations and interviews with resource persons, it was found that the implementation of PATEN Policy in Kutoarjo District has been run in accordance with the applicable Regulation, but there are still some problems that become obstacles in the implementation of PATEN Policy, ie lack of understanding of the society about requirements of the petition, less of active participation in socialization, lack of human resources and lack of facilities and infrastructure in the implementation of PATEN.*

*Seeing this problems, the authors suggest that the district government can take action to review the obstacles in the implementation of the PATEN program. The need for funding support for districts, improvement of facilities and infrastructure and adequate apparatus both the quality and quantity as well as the improvement of innovation that is done by the “Camat” in the PATEN program.*

***Keywords: Policy Implementation, Administration Service for Integrated***

 ***Districts (PATEN), Districts***